

# Pemko Minta Penambahan Lahan Pemakaman

**BATAM KOTA** – Pemko Batam mengupayakan untuk menambah lahan pemakaman dengan meminta alokasi tanah ke Badan Pengusahaan (BP) Batam. Seperti diketahui, Batam hanya memiliki beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU)

seperti di Seipanas, Seitemiang, Sambau, Tanjungriau, dan Tanjungsengkuang.

“Kami kirimkan surat ke BP, wajib kami minta,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam Centre, Senin (26/2).

Kini, lahan pemakaman di

Batam sangat terbatas, di antaranya di Taman Langgeng Seipanas dan Seitemiang. Menurut Rudi, TPU yang ada saat ini tidak mencukupi untuk warga kota yang kini sudah mencapai 1,2 juta jiwa.

Bila BP Kawasan masih

memiliki lahan, maka Pemko berharap bisa dialokasikan untuk pemakaman. “Lahan tidak berkurang, tapi pemanfaatannya yang habis. Kalau masih ada lahan kami minta,” ujarnya.

Bila memungkinkan, setiap

kecamatan ada lahan pemakaman. Namun bila tidak, setidaknya ada satu pemakaman dalam dua hingga tiga kecamatan. Penduduk Batam kebanyakan pendatang yang berasal dari daerah lain di Indonesia.

Ke hal 12

# Pemko Minta...

((Dari hal 9

Warga kota umumnya berusia produktif yang datang untuk bekerja di industri yang berkembang.

Pada awalnya desainnya, kota itu memang tidak disiapkan untuk tempat tinggal keluarga hingga usia senja, karena memang disiapkan sebagai kota industri. Karenanya, lahan pemakaman tidak banyak disediakan. Namun perkembangannya, sudah banyak warga usia lanjut yang menetap.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam Aspawi Nangali mengaku telah berulang kali mengajukan permintaan lahan untuk makam kepada BP Batam. Namun langkah tersebut tidak pernah direspons oleh pengelola lahan di Batam itu. "Sudah sering kami ajukan. Tak pernah ada tanggapan dari BP Batam. Padahal ketersediaan makam semakin terbatas," ujarnya 17 Septem-

ber 2017 lalu.

Pihaknya bersama Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam terus berkoordinasi agar mendapatkan lahan yang digunakan khusus sebagai tempat pemakaman. "Kami hanya sebatas mengukur lahan saja. Dan pengelolaan sepenuhnya dikelola oleh Disperkimtan untuk masyarakat Batam. Tapi itu tadi lahan belum juga dikasih sama mereka (BP Batam)," katanya.

Pemko Batam berencana akan melakukan penambahan dua titik lokasi pemakaman umum yaitu, di Kabil dengan luas 2 hektare dan Seibeduk 6 hektare. Penambahan titik pemakaman umum berdasarkan pada tingkat pertumbuhan penduduk Batam. "Dua lokasi tempat yang direncanakan belum terdapat pemakaman umum," kata Aspawi.

● **ahmad rohmadi/**  
**antara**

# Pembahasan UMSK Buntu

**SEKUPANG** – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan pemerintah hanya memfasilitasi pembahasan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) antara serikat pekerja dengan pengusaha. Sebab yang memutuskan UMSK adalah Gubernur Kepri.

“UMSK ini hanya ditetapkan

pengusaha dan serikat pekerja, kami tidak termasuk dalam pembahasan ini,” ujarnya kepada massa butuh yang berunjuk rasa di Kantor Disnaker Batam, Sekupang, Selasa (27/2).

Seperti diketahui, pembahasan UMSK Batam yang digelar di Kantor Disnaker menemui jalan buntu. Pasal-

nya, asosiasi pengusaha menolak peran Dewan Pengupahan Kota (DPK) ikut campur dalam pembahasan UMSK.

Rudi menuturkan, saat ini tidak ada keputusan terkait UMSK, karena pihak pengusaha tidak mau dalam pembahasan ada DPK yang ikut campur.

Ke hal 12))

# Pembahasan UMSK...

((Dari hal 9

Pasalnya, pihak pengusaha ingin pembahasan tersebut antara serikat pekerja. "Apindo ingin Bipartit, jadi pembahasan hari ini (kemarin) menemui jalan buntu," ujarnya.

Pantauan KORAN SINDO BATAM, ratusan pengunjung rasa dari aliansi pekerja meminta hak UMSK yang selama ini tidak direalisasikan di Batam selama dua tahun. Aliansi pekerja dari Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pe-

kerja Nasional (SPN), maupun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) terus mengawal pembahasan UMSK.

Perwakilan Apindo, Rafki mengatakan, pengusaha belum bisa memutuskan angka UMSK, karena belum adanya titik temu antara pihak pengusaha dan serikat pekerja di lima sektor yang sudah ada. "Dewan pengupahan tidak ada wewenang dalam pembahasan UMSK, karena kewenangan mereka hanya pada penetapan UMK," ujarnya.

Dalam pembahasan UMSK hanya ada pihak pengusaha dan serikat pekerja atau Bipartit, sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri. "Pengusaha tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perundingan, dan kami sebagai pengusaha membuka pintu untuk berunding dengan serikat pekerja untuk membahas UMSK ini," kata Rafki.

Pihak pengusaha ingin lima

sektor dalam UMSK harus dibahas sesuai dengan sektor yang akan naik dengan serikat pekerja, sehingga kedua belah pihak mengetahui kenaikan setiap sektor. "Kami tak ingin membawa hal ini ke PTUN, karena hal ini masih bisa dibicarakan dalam perundingan," katanya.

Ketua DPC FSP LEM SPSI Mukakuning, Rotiana Ginting mengaku akan tetap bertahan hingga keputusan UMSK mendapati kata sepakat. Pasalnya, selama dua tahun, para

pekerja tidak pernah mencicipi UMSK. "Lima sektor yang kami minta adalah perusahaan kimia, pertambangan, alat berat, offshore dan perbankan," kata Rotiana.

Selama ini pihak pekerja selalu dirugikan oleh pihak pengusaha, karena saat ini pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 2 persen. "Sekarang perekonomian sudah naik, sudah seharusnya hak kami diberikan," ujarnya.

● romi kurniawan

# Masyarakat Diminta Bercocok Tanam

**BATAM KOTA** – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, harga kebutuhan pokok seperti cabai, bawang, sayuran, ikan, daging serta beras kembali meningkat. Hal itu tidak bisa dipungkiri akibat tingginya angka inflasi yang terjadi di Batam saat ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pertumbuhan ekonomi Batam Januari lalu 2,01 persen. Namun in-

flasi tinggi, di angka 4,46 (year on year/yoy). Artinya ada selisih atau kesenjangan sebesar lebih dari 2 persen antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi. "Kami minta masyarakat bisa bercocok tanam di rumahnya, untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari," ujarnya di Batam Centre, kemarin.

Untuk menekan inflasi di Batam, diharapkan masyarakat bisa menanam tanaman

seperti cabai atau sayuran di rumah. Sementara BI juga mengusulkan pekarangan sekolah untuk bercocok tanam. Agar harga-harga bahan pokok bisa ditekan melalui membudidayakan masyarakat dalam bercocok tanam.

"Memang kita bukan daerah produksi, tapi ini bisa dilakukan masyarakat. Kami berupaya mengantisipasi tingginya harga kebutuhan pokok menjelang

hari Raya Idul Firi dan Idul Adha," kata Amsakar.

Pemko akan mengajukan pembukaan keran impor beras ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal ini dilakukan karena beras dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). "Kami akan berupaya memenuhi kebutuhan beras yang saat ini harganya di atas HET," katanya.

Namun di tengah permintaan itu, Pemko juga memiliki

program bazar bahan pokok murah. Tahun ini sebanyak 128 ribu paket bahan pokok bersubsidi digelontorkan di 64 kelurahan yang ada di Kota Batam. "Meski bahan pokok murah ini tidak serta merta dapat menekan inflasi dan memenuhi kebutuhan di Batam, tapi sedikit banyaknya mempengaruhi atau mengintervensi harga beras di pasar," kata Amsakar.

● **m arief rachman**

# Disperindag Temukan Logo Halal Tempelan

**BATAM KOTA** – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam akan menurunkan tim untuk menindak keluhan masyarakat. Tim akan mengawasi peredar-

an makanan kemasan, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan penjualan kebutuhan pokok di supermarket, pasar modern serta tradisional.

Ke hal 12 ))

# Disperindag Temukan...

«Dari hal 9

Kepala Disperindag Batam Zarefriadi mengatakan, pihaknya selalu melakukan pengawasan rutin setiap minggunya ke sejumlah lokasi. Di mana tim langsung menindak jika ada laporan dari masyarakat terkait makanan yang tidak sesuai dijual oleh pedagang.

"Selain melakukan pengawasan rutin, kami menindak

lanjuti laporan yang ada. Pekan kemarin kami menindak laporan di salah satu mini market yang menjual makanan tanpa logo halal di kemasan," ujarnya di Batam Centre, Selasa (27/2).

Pihaknya juga memberi teguran tegas kepada pengelola mini market yang menjual makanan dan bahan pokok yang menyalahi aturan. Pedagang tidak boleh menjual

makanan tersebut dan diharapkan barang ditarik dari peredaran. "Makanan tersebut tidak dilengkapi logo halal yang seharusnya dicetak langsung di kemasan. Logonya hanya tempelan, itu tidak boleh," katanya.

Selain itu, tim juga akan melakukan pengawasan terhadap tera ulang timbangan di sejumlah pasar yang ada di Batam. Tera dilakukan terhadap selu-

ruh alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan untuk menimbang bahan pokok.

"Kami awasi secara rutin dan memang ini sudah agenda Disperindag. Tera dan tera ulang wajib bagi para pedagang, sementara mengenai biaya berbeda-beda sesuai kapasitas UTTP," katanya.

UTTP diatur dalam Per-

aturan Wali Kota Batam Nomor 49 tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang. Sebab jika ada pelanggaran ditemukan akan dikenakan sanksi dengan acuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pasal 23 ayat 1 dengan ancaman pidana kurungan satu tahun atau denda Rp 1 juta.

● m arief rachman

# Batam Siapkan 128 Ribu Paket Sembako Murah

**BATAM KOTA** – Pemko Batam menyiapkan 128 ribu paket sembako murah untuk masyarakat tidak mampu. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan pengadaan paket sembako murah itu sudah dianggarkan dalam APBD 2018 dan siap disalurkan ke masyarakat.

"Tahun ini ada 128 ribu paket sembako bersubsidi yang digelontorkan di 64 kelurahan," kata dia, Selasa (27/2).

Sembako murah yang disubsidi itu untuk mengurangi beban masyarakat, terutama menjelang hari raya, saat harga kebutuhan meningkat. Namun, sembako murah tidak serta merta dapat menekan

inflasi, terutama harga beras. Untuk itu Pemko Batam mengajukan pembukaan impor beras.

"Wali kota sudah meminta ke kementerian agar dibuka importasi di Batam," kata dia.

Harga beras di pasar-pasar kota terlalu tinggi. Beras kualitas medium rata-rata Rp14.000 per kg, di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Dia mengatakan bila impor beras dilakukan, maka dapat menekan harga. Selain harga dari negara asal lebih murah, ongkos distribusinya juga lebih sedikit ketimbang membawa beras dari Pulau Jawa.

● **antara**



Pihak Pemko Batam memberikan paket sembako murah di kawasan Bengkong, beberapa waktu lalu.